

## POLITISASI IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGERA TIMUR TAHUN 2018

**Karel Francius Noni Nope<sup>1,2\*</sup>, Ari Ganjar Herdiansah<sup>3</sup> & Wawan Budi Darmawan<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup> Universitas Padjajaran, <sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang

<sup>1,3,4</sup> Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, FISIP, Universitas Padjajaran, Sumedang Indonesia

\*Korespondensi: ronnynope@gmail.com

Received: 15/02/2021 | Revised: 27/05/2021 | Accepted: 30/05/2021

### Abstract

*Identity is an element that is vulnerable to being politicized in elections in Indonesia. Identity based on religion or ethnic ideology is used to achieve political goals. This research takes a case study on the 2018 East Nusa Tenggara gubernatorial election which focuses on the Victory-Joss pair with a qualitative approach through observation, interviews, and literature study. The results of the study found that national issues, such as the Ahok case and radicalism, became the advantages of candidates in using them as political instruments. In his campaign rhetoric, Victory-Joss has always emphasized the importance of strengthening a broader national identity as a unifying political tool in expanding the voter segment. This article concludes that identity politics in the 2018 NTT Governor and Deputy Governor Elections took the form of national issues rather than local context identities.*

*Keywords: election, pilkada, identity politics, primordialism*

35

### Abstrak

Identitas menjadi unsur yang rentan dipolitisasi dalam pemilu di Indonesia. Identitas baik itu berbasis agama maupun etnik ideologi digunakan untuk mencapai tujuan politik. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 yang fokus pada pasangan Victory-Joss dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa isu-isu nasional, seperti kasus Ahok dan radikalisme, menjadi keunggulan kandidat dalam menggunakannya sebagai instrumen politik. Dalam retorika kampanye, Victory-Joss senantiasa menekankan pentingnya penguatan identitas nasional yang lebih luas sebagai alat politik pemersatu dalam meluaskan segmen pemilih. Artikel ini menyimpulkan bahwa politik identitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 lebih mengambil bentuk pada isu nasional ketimbang identitas konteks lokal.

Kata kunci: pemilu, pilkada, politik identitas, primordialisme

### PENDAHULUAN

Politik identitas di Indonesia telah lama menjadi topik pembicaraan menarik dikalangan para ahli ilmu-ilmu sosial. Isu identitas sangat berpengaruh dan menjadi hal yang dominan dalam penentuan pilihan rakyat pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, ada polarisasi yang prioritasnya bersumber pada etnis dan agama. Geertz (1963) dalam tulisannya tentang “*primordial sentiment*” menyatakan bahwa studi tentang politik identitas akan terus mendapatkan perhatian, terutama yang berkaitan dengan identitas keetnisan, agama, gender, masyarakat pribumi (*indigenous community*), dan masyarakat lokal (*local communities*) (dalam Buchari, 2014).

Politisasi identitas diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas baik itu berbasis agama, etnik, gender atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok atau individu (Burke, 2003). Demokrasi memberikan ruang kepada setiap individu maupun kelompok identitas agar dapat

turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi sehingga bisa mengakibatkan terjadinya instabilitas politik (Herdiansah, 2017).

Politisasi identitas juga menunjukkan suatu sikap prioritas politik atau perilaku khusus kepada sekelompok orang yang berasal dari daerah, suku bangsa atau ras tertentu. Proses rekrutmen pemimpin di daerah cenderung didasarkan pada parameter-parameter primordialisme, yang memfasilitasi semakin berkembangnya semangat kedaerahan dan kesukuan (Jumadi dan Yaakop, 2013). Politisasi identitas berdasarkan primordial tidak hanya ditampilkan calon pemimpin atau calon kepala daerah, akan tetapi bagi pemilih menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perilaku politik pemilih. Ketika politik identitas dimanipulasi oleh kepentingan elite politik, maka terdapat beberapa resiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi. Terlebih lagi, dalam keadaan heterogenitas etnik yang seringkali menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi (Birbir, 2007).

Pasca reformasi politik identitas dihadapkan pada beberapa persoalan seperti krisis identitas, konflik horizontal, konflik multikultur, disintegrasi bangsa, instabilitas politik, kekerasan dan kriminalitas sebagai gejala krisis multidimensional. Hal yang paling krusial lainnya adalah lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Kemajemukan dalam bidang budaya, ras, suku, agama, bahasa, sumber daya merupakan tantangan bagi identitas nasional Indonesia. Jika dapat dikelola dengan baik, maka kemajemukan akan mendatangkan kemakmuran dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Akan tetapi, jika tidak dapat dikelola dengan tidak baik, maka kemajemukan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Salah satu catatan penting yaitu berkaitan dengan Pemilihan Gubernur NTT 3 (tiga) kali setelah pasca reformasi, yaitu: tahun 2008, tahun 2013, dan tahun 2018 bahwa isu identitas primordial terkait dua agama besar sangat kuat pengaruhnya dalam penentuan pasangan calon (Negong, 2017).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu Viktor B. Laikodat-Josef E. Nae Soi (Victory-Joss), Marianus Sae-Emelia Nomleni (MARHAEN), Esthon L. Foenay-Christian Rotok (Esthon-Chris), dan Benny Harman-Benny Litelnoni (HARMONI) yang dimenangkan oleh pasangan Victory-Joss (Data KPU, 2018). Kemenangan Victory-Joss di 5 (lima) kabupaten (Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Lembata, dan Sikka) ini sangat menarik karena kemenangan sebelumnya di lima kabupaten ini selalu dimenangkan oleh Gubernur yang beragama Katholik. Hal ini menunjukkan adanya degradasi dukungan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018, yang mana figur calon Gubernur Viktor B. Laikodat beragama Kristen Protestan, sedangkan perilaku politik memilih masyarakat NTT masih sangat terpengaruh akan isu identitas primordial berbasis agama dan etnis.

Pasangan Victor B. Laikodat sebelum menjadi calon Gubernur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT pernah mendapatkan kasus dan dilaporkan oleh beberapa orang dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian yaitu menyampaikan orasi politik yang menjadi kontroversi dan polemik politik di Indonesia. Orasi politik menyinggung hal sensitif yang menimbulkan reaksi masyarakat sehingga menjadi viral di media sosial. Pidato yang mengakibatkan pro dan kontra ini terjadi sebelum proses tahapan Pemilihan Gubernur NTT yang diselenggarakan tahun 2018. Salah satu isi pidato dari Viktor B. Bungtilu Laikodat menyebutkan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat mendukung Ormas yang dianggap radikal seperti HTI (Kuwado, 2017). Viktor B. Laikodat diduga menuduh partai Gerindra berada pada urutan pertama sebagai partai yang dianggap mendukung kelompok ekstrimis yang ingin mendirikan negara khilafah yang merupakan bagian dari isu nasional. Aneka isu nasional sangat berpengaruh di beberapa daerah yang dimanfaatkan oleh politisi yang wilayahnya akan melaksanakan pemilukada (Gunandha, 2017).

Tanpa disadari isu nasional juga berpengaruh terhadap kontestasi Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018. Berpengaruhnya isu nasional seperti kasus Ahok (*Ahok effect*) yang terbangun karena dipolitisasi berdasarkan primordial yang digunakan oleh para politisi di DKI Jakarta akibatnya melahirkan sentimen primordial berbasis identitas di kalangan masyarakat NTT khususnya sentimen agama yang mayoritas 90% beragama Nasrani (Katholik dan Protestan). Maraknya sentimen primordial ini sejak persoalan Ahok di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dimanfaatkan oleh para politisi di NTT dalam meraih kemenangan dengan menggunakan berbagai

isu-isu identitas berbasis primordial sebagai alat politik kampanye untuk mencapai kemenangan. Penelitian tentang politik identitas dalam negara demokrasi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti maupun civitas akademik. Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan penggunaan isu-isu identitas yang dilakukan oleh Victory-Joss dalam upaya pemenangan pada Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 masih belum banyak yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis memfokuskan penelitian pada pasangan calon Viktor B. Laiskodat dan Josef A. Nae Soi dan tim pemenangan dalam mengelola isu-isu identitas untuk penguatan wacana politiknya, rekrutmen tokoh masyarakat, sosialisasi safari politik dan kampanye serta isu-isu identitas yang dikapitalisasi dalam perencanaan pemenangannya, yaitu menganalisis bagaimana penggunaan isu-isu identitas sebagai upaya pemenangan oleh Victory-Joss.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari setiap individu-individu atau kelompok/Tim Pemenangan atau lembaga yang memiliki peranan terhadap kemenangan kandidat Victory-Joss dalam penggunaan isu-isu identitas sebagai upaya pemenangan pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Data penelitian ini juga didukung dari sumber data sekunder seperti buku, jurnal, data-data statistik, pemberitaan media massa yang relevan dengan kajian penelitian, pedoman umum, hasil studi dari berbagai literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian untuk mempertajam kredibilitas penelitian. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Verifikasi data dilakukan melalui teknik *triangulasi*, yaitu membandingkan data-data yang diperoleh sehingga sampai pada keyakinan bahwa data yang didapatkan adalah valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi politik NTT erat kaitannya dengan komposisi penduduk NTT yang mayoritas beragama Kristen (Katholik dan Protestan) mencapai 90% terdiri dari Katholik berjumlah 51,83%, Protestan 36,68%, Islam 11,23%, Hindu 0,20% dan Budha 0,01% (Data BPS Provinsi NTT, 2017). Agama Katholik menjadi mayoritas di beberapa kabupaten diantaranya kabupaten yaitu kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat. Protestan menjadi mayoritas di kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor. Sedangkan agama Islam dengan jumlah populasi cukup besar berada di Kabupaten Ende, Flores Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat. Gambaran di atas menunjukkan kondisi geografis provinsi NTT yang mempengaruhi kondisi sosiologis akibatnya memunculkan praktek politik dalam membuat kombinasi antar wilayah yang merepresentasikan hal yang bersifat etnisitas agama dan suku khususnya pada Pemilihan Gubernur NTT.

Praktik politik identitas berbasis agama cukup jamak terjadi di NTT. Selama tiga kali Pemilihan Gubernur NTT setelah pasca reformasi, faktor etnik dan agama sangat kuat pengaruhnya dalam penentuan kandidat pada level partai politik dan pilihan masyarakat. Namun, politik identitas agama di provinsi NTT dengan mayoritas penduduk beragama Kristen (Katolik dan Protestan) ini sulit terdeteksi dalam kegiatan politik berskala besar seperti pada kampanye politik akbar Jokowi di Kupang pada 8 April 2019. Umumnya, eksploitasi politik identitas berbasis agama terjadi di kegiatan kampanye berskala kecil dan lokal sehingga luput dari liputan media. Pentingnya identitas pada gilirannya mendorong partai politik pengusung agar mencari para kandidat calon Gubernur NTT tanpa melepaskan citra representasikan identitas daerah yang mayoritas seperti suku dan agama sebagai jalan transformasi dalam berbagai strategi politik. Kombinasi etnik seperti etnik Timor dan Flores, Flores dan Timor, Sumba dan Flores ataupun Sumba dan Timor serta dikaitkan dengan agama mayoritas di NTT yaitu Katholik dan Protestan.

Pilkada serentak tahun 2018 dilaksanakan serentak pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018. Hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur NTT dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut empat Viktor B. Laiskodat-Josef A. Nae Soi mendapatkan 838.213 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 35,20%. Perolehan suara terbanyak kedua adalah pasangan calon nomor urut dua juga yaitu Marianus Sae dan Emilia J. Nomleni mendapatkan 603.822 suara atau 25,35% (Data KPU, 2018).

Perolehan surat ketiga adalah pasangan calon nomor urut satu Esthon Foennay dan Christian Rotok mendapatkan 469.025 suara atau 20,82% dan terakhir adalah perolehan suara ke empat adalah pasangan calon nomor urut tiga adalah Benny K. Harman dan Benny A. Litelnoni mendapatkan 443.796 suara atau 18,63%. Berikut adalah Tabel peta kemenangan Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018, berdasarkan Model DC1 KWK1 Komisi Pemilihan Umum NTT (Data KPU, 2018).

### *Instrumentalisme Identitas*

Hasil yang diperoleh Victory-Joss, telah menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kandidat, partai pengusung, tim kampanye dalam upaya pemenangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 cukup berhasil. Partai pengusung seperti NasDem, Golkar dan Hanura memberikan banyak kontribusi. Ketiga partai ini bekerja sama dalam satu tim gabungan pemenangan. Tujuan penggabungan dengan maksud agar dalam melaksanakan program dapat lebih terarah, sesuai dengan strategi pasangan calon yang telah disepakati bersama dengan Tim Pemenangan Victory-Joss dalam upaya untuk mencapai kemenangan.

Berdasarkan hasil penelitian strategi pasangan calon Victory-Joss mempunyai dua strategi yaitu perencanaan pemenangan secara konvensional dan secara khusus. Strategi perencanaan pemenangan secara konvensional meliputi perekrutan pasangan calon dan sosialisasi politik, penguatan wacana visi dan misi, membentuk tim pemenangan dan tim relawan serta penggunaan media massa dan media sosial dalam mempromosikan pasangan calon. Sedangkan strategi pasangan calon Victory-Joss yang cukup memberikan kontribusi utama adalah penggunaan isu-isu identitas agama dari Isu nasional yang dikapitalisasi oleh pasangan calon dalam melakukan sosialisasi politik dan kampanye. Penggunaan isu-isu identitas seperti kasus Ahok (*Ahok effect*), Gerakan 212, isu pembentukan Negara Khilafah, dan isu Piagam Jakarta. Strategi pasangan calon ini yang menjadi kekuatan dari pasangan calon Victory-Joss dalam meraih kemenangan (Tolo, 2019).

Pada Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018, dari empat pasangan calon ini, secara geografis semuanya representasi dari Timor dan Flores. Esthon L. Feonay, Viktor B. Laiskodat, Emilia J. Nomleni dan Benny A. Litelnoni adalah orang Timor. Sedangkan, Marianus Sae, Benny K. Harman dan Christian Rotok berasal dari Flores. Perekrutan pasangan calon yang tampil dalam pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 dalam kajian ini memang merepresentasikan perpaduan etnik dan agama. Kombinasi etnik seperti etnik Timor dan Flores, Flores dan Sumba ataupun Timor dan Sumba yang kemudian dipadukan dengan agama terus mewarnai seluruh proses perekrutan pasangan calon Gubernur NTT selama ini setelah masa reformasi (Data KPU, 2018). Bagi tim pemenangan dari Partai NasDem mengatakan bahwa jikalau partai Golkar mendukung paket Victory-Joss maka gabungan jumlah kursi partai NasDem dan Golkar berkoalisi akan masuk dalam syarat pencalonan minimal 20%. Banyak pertimbangan ini yang membuat Josef A. Nae Soi dipilih untuk mendampingi Viktor B. Laiskodat salah satunya pertimbangan berdasarkan primordial merupakan strategi dan kontribusi utama strategi dalam upaya mencapai kemenangan.

Fenomena perekrutan pasangan calon mengkombinasikan berdasarkan pertimbangan primordial itu merupakan bagian dari strategi perencanaan pemenangan yang masih bisa dikatakan sebagai politik identitas. Hal ini menjadi tolak ukur penggunaan politik identitas karena masyarakat pemilih di NTT masih memilih kandidat berdasarkan pada faktor primordial. Contohnya representasi pasangan calon harus ada yang beragama Katholik sebab mayoritas agama terbanyak di NTT adalah Katholik oleh karena itu citra yang terbangun memiliki representasi suara mayoritas Katholik dan etnis Flores. Otomatis berpengaruh untuk mendongkrak elektabilitas paket Victory-Joss di Flores. Begitupun sebaliknya di Timor maupun di Sumba. Pemilih lebih melihat figur berdasarkan kesamaan etnisitas dan itu sering terjadi pada Pemilihan Gubernur periode-periode sebelumnya.

Hal ini seperti yang dikatakan Jumadi dan Yaakop (2009) bahwa proses rekrutmen pemimpin di daerah cenderung didasarkan pada parameter-parameter primordialisme, yang memfasilitasi semangat kedaerahan dan kesukuan. Secara teoritis, pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual anggota agama dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis agama sebagai sumber kekuatan sosial.

Sosialisasi politik pasangan calon Victory-Joss berupa pendekatan agama dan etnis ketika melakukan safari politik keliling Provinsi NTT adakalanya menggunakan atribut atau idiom-idiom budaya setempat yang dikunjungi. Menurut peneliti, kegiatan sosialisasi politik yang dibungkus politisasi identitas adalah hal yang wajar, terjadi dimana saja karena bentuk penghargaan terhadap budaya setempat. Terpenting tidak merugikan masyarakat pada umumnya dalam pelanggaran norma-norma budaya atau melakukan *black campaign* terhadap kandidat lain (Negong, 2017).

Penggunaan idiom-idiom budaya dan agama yang tanpa tidak sengaja dilakukan oleh pasangan calon Victory-Joss sebenarnya ada nuansa positif bagi kepentingan bersama antara masyarakat dan pasangan calon Victory-Joss yang memberikan pesan persatuan dalam perbedaan. Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, politisasi identitas itu tidak bisa dihindari, yang terpenting sadar ada platform bahwa Pancasila dan sistem demokrasi sudah final, cocok dengan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnisitas. Kalau melanggar aturan Undang-Undang artinya melawan negara. Ketika tanpa sengaja pasangan calon menggunakan simbol-simbol agama dan budaya setempat, maka masyarakat tersebut merasa nilai, norma, dan simbol budaya mereka dihargai dan merasa bangga karena pasangan calon yang melakukan kampanye dan sosialisasi merupakan representasi dari mereka (Negong, 2017).

Setiap daerah di Provinsi NTT mempunyai beragam tarian unik yang biasa dipakai sebagai ritual penjemputan atau simbol penerimaan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh beberapa penari pria dan wanita dengan gerakan sangat khas. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, festival budaya dan pertunjukan seni. Begitupun tenun ikat merupakan suatu artefak budaya yang mengikat masyarakat dalam pertautan batin persaudaraan yang kokoh. Tenun ikat bukan saja benda mati yang tidak mengkomunikasikan apa pun. Tetapi, justru tenun ikat menjadi media komunikasi kemanusiaan yang begitu sering terlibat dalam jalin-jemalin kekerabatan masyarakat pada umumnya di Provinsi NTT. Kain tenun ikat juga memiliki dimensi penghormatan yang luar biasa terhadap sesama yang biasanya menyambut tamu terutama pejabat daerah atau pusat.

Penggunaan idiom-idiom adat dan budaya yang terjadi selain itu adalah calon Gubernur NTT tahun 2018 Viktor B. Laiskodat disambut oleh tarian adat Likurai dan Natoni adat (penyambutan adat) oleh masyarakat berupa narasi-narasi bahasa daerah oleh perwakilan dari para Raja. Contohnya Raja Mikhael Bana mengenakan pakaian kebesaran kepada Viktor B. Laiskodat yang baru saja dinobatkan sebagai Raja Muda Binmaffo. Viktor B. Laiskodat juga diberikan cendera mata berupa patung dari kayu cendana yang merupakan hasil kekayaan alam dari wilayah itu sebagai simbol terjalin ikatan yang tetap kukuh dan kuat sebagai pemimpin yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan pendekatan instrumentalisme, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018. Sebenarnya, politisasi identitas berbasis agama di Provinsi NTT sulit terdeteksi dalam kegiatan politik berskala besar. Umumnya eksploitasi politik identitas berbasis agama terjadi berskala kecil dan yang luput dari liputan media. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua tim pemenang, khususnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018, Tim pemenang mengakui bahwa politisasi identitas terjadi dimana saja, sengaja ataupun tidak sengaja, walaupun hanya menggunakan atribut atau simbol agama dan etnik, secara teoritis politik itu juga bisa dikatakan sebagai politisasi identitas.

Politik identitas berbasis agama Nasrani di NTT ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak, terutama para politisi, untuk meraup kepentingan ekonomi dan politiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown (1989) bahwa etnis merupakan salah satu bentuk asosiasi yang digunakan oleh individu-individu dalam mengejar kepentingan mereka terkait keuntungan ekonomi dan politik.

Fenomena penggunaan politik identitas berupa isu-isu identitas berbasis agama yang digunakan saat pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 tersebut merupakan mata rantai dari gerakan yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2016, yang dikenal dengan nama “Gerakan 212”. Gerakan 212 ini juga disemangati oleh salah satu Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan mereka berafiliasi dengan Anis-Sandi. Tujuan Gerakan 212 ini menuntut Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 (Tolo, 2019).

Ahok *effect* dan Gerakan 212 membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap elektabilitas pasangan calon Victory-Joss di Provinsi NTT. Kampanye Victory-Joss sangat dibantu oleh kekuatan isu dari efek DKI terutama ketika Victory-Joss menghadirkan adik Ahok, Vivi Leti Purnama, ketika membacakan surat yang ditulis oleh Ahok dari penjara ini ditujukan kepada pasangan Victory-Joss atas dukungan Ahok kepada pasangan Victory-Joss untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur NTT tahun 2018 sehingga pasangan calon Victory-Joss lebih mudah diterima masyarakat NTT pada umumnya yang mendukung Ahok (Tolo, 2019).

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 politisasi identitas berbasis agama sulit terdeteksi dalam kegiatan politik berskala besar. Umumnya eksploitasi politik identitas berbasis agama menonjol tetapi terjadi berskala kecil. Faktor agama menonjol bukan pada level domestik/lokal di NTT tetapi faktor keagamaan menonjol lebih bersifat universal di tingkat nasional yakni secara keseluruhan menyinggung kepada umat Nasrani baik dari kalangan agama Katholik maupun kalangan agama Protestan yang dikatakan sama-sama Nasrani bersatu dan terpengaruh dengan isu nasional dan menentang 'Gerakan 212, Piagam Jakarta, dan Pembentukan Negara Khilafah'. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua tim pemenangan, khususnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018, tim pemenangan mengakui bahwa politisasi identitas terjadi di mana saja, sengaja ataupun tidak sengaja, walaupun hanya menggunakan atribut atau simbol agama dan etnis, secara teoritis itu juga bisa dikatakan sebagai politisasi identitas (Tolo, 2019).

## PENUTUP

Melalui perspektif pendekatan instrumentalisme tim pemenangan Viktor B. Laikodat dan Josef A. Nae Soi (Victory-Joss) melihat peluang yang baik untuk meningkatkan elektabilitas Victory-Joss. Pemanfaatan pengelolaan isu-isu identitas keagamaan ini dilibatkan sebagai strategi politik kemenangan yang dimanipulasi oleh tim pemenangan muncul karena sejak adanya masalah nasional seperti kasus Ahok (Ahok *effect*) dan 'Gerakan 212' yang berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Hal ini sangat berpengaruh karena masyarakat NTT yang mayoritas beragama Nasrani yang berjumlah 90%.

Politik identitas keagamaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 ini bukan menonjol pada level domestik/lokal di NTT tetapi lebih menonjol pada tingkat nasional/universal. Politisasi identitas berbasis agama dalam tataran identitas lokal tidak berpengaruh besar dalam peningkatan elektabilitas Victory-Joss hanya berpengaruh saat perekrutan kombinasi pasangan calon berdasarkan identitas agama sesuai dengan representasi mayoritas masyarakat NTT.

40

## DAFTAR PUSTAKA

- Birnir, J. K. (2007). *Ethnicity and Electoral Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown D. (1989). Ethnic revival: Perspectives on state and society. *Journal Third World Quarterly*, 11(4).
- Buchari, S. A. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burke, P. J. (2003). Introduction. In P. J. Burke, T. Owens, R.T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advance in Identity Theory and Research*. New York: Plenum Publisher.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- Data Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- Geertz, C. (1963). The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States. In C. Geertz, *Old Societies and New States*. New York: The Free Press.
- Gunandha, R. (2017). Sebut 4 Partai Dukung Khilafah, Ini Pidato Asli Victor Laiskodat. tersedia: <https://www.suara.com/news/2017/08/08/094340/sebut-4-partai-dukung-khilafah-ini-pidato-asli-victor-laiskodat> dunduh pada 15 Oktober 2019
- Jumadi & Yaakop, M. (2013). Keterwakilan Etnis dalam Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 2 (11): 81-90

- Herdiansah, A.G. 2017. Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawashu*, 3 (2): 169-183.
- Kuwado, J. F. (2017). Setelah Gerindra dan PKS, Kini PAN Laporkan Viktor Laiskodat ke Bareskrim tersedia: <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/04/19450801/setelah-gerindra-dan-pks-kini-pan-laporkan-viktor-laiskodat-ke-bareskrim>. diunduh pada 15 Oktober 2019
- Negong, Y. (2017). Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013 di Kota Kupang. ISSN 2502-776X. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2).
- Tolo, E. Y. S. (2019). Pemilu 2019 dan Politik Identitas Berbasis Agama Nasrani di NTT,” wajah Islam progresif Indonesia, 13 Agustus 2019. Tersedia: <https://islambergerak.com/2019/04/pemilu-2019-dan-politik-identitas-berbasis-agama-nasrani-di-ntt/> diunduh pada 02 November 2019
- Tolo, E. Y. S. (2019). Di Bawah Bayang-bayang Ahok: Politik Identitas dalam Pemilu di NTT 30 April 2019. Tersedia: <https://tirto.id/di-bawah-bayang-bayang-ahok-politik-identitas-dalam-pemilu-di-ntt-dniM> diunduh pada 02 November 2019.

